

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsistensi adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat terkait dengan satu subjek tertentu. ketentuan larangan bagi setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan hak bagi setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik memiliki konsistensi hukum karena keduanya memiliki subjek hukum yang berbeda, yaitu pemegang hak atas sebelumnya dan pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, ketentuan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ini seringkali menjadi sarana kriminalisasi bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata mengganggu atau merintangi dalam pasal atau ketentuan tersebut.
2. Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum maupun untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya; 2. Jaminan kepastian hukum; 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya; 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan usaha pertambangan memenuhi unsur tersebut, yaitu: terdapat perlindungan dari pemerintah terhadap warganya yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Pasal 28H UUD 1945; dan terdapat

sanksi kepada pemegang izin pertambangan mineral dan batubara apabila melanggar hak-hak masyarakat sekitar dan tidak melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum bagi orang keberatan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah perlindungan untuk masyarakat yang berada di dalam batas wilayah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023, terdapat ketentuan yang dapat mengkriminalisasi masyarakat tersebut, yaitu Pasal 162 UU Minerba. Perlindungan hukum dari kriminalisasi tersebut dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UUPPLH. Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemegang izin pertambangan mineral dan batubara dengan alasan masyarakat merasa terganggu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atau kualitas lingkungan hidup menurun, yang harus diprioritaskan adalah masyarakat tersebut karena hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta usaha kegiatan pertambangan tidak dapat menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keberatan dari masyarakat sekitar yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa harus mengkriminalisasi atau tanpa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Selain itu, pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebaiknya memperhatikan dan memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara serta peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi

penolakan maupun keberatan dari masyarakat terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Sebaiknya, pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat berperan aktif dari awal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, seperti pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat terlibat dalam proses pelaksanaan Amdal dari tahap awal kegiatan pertambangan mineral dan batubara agar meminimalisir terjadinya konflik dengan pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.
3. Sebaiknya, pemerintah memperjelas pengaturan terkait Pasal 66 UUPPLH terkait bagaimana pelaksanaan Anti Eco-SLAPP itu sendiri dan memperjelas penafsiran Pasal 162 UU Minerba agar tidak terjadi multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cekli Setya Pratiwi, et.al., Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.
- Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, UBB Press, Bangka Belitung, 2018.
- Eka N. A. M Sihombing & Ali Marwan, Ilmu Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2021.
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, WR Penerbit, Jakarta, 2016.
- Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, Hukum Lingkungan, Kencana, Jakarta, 2021.
- Koesnadi Hardiasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah mada Universitas Press, Yogyakarta, 1999.
- N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Nurhasanah Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo S., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Salim H.S., Hukum Pertambangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Salim H. S., Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Sukandarrumidi, Bahan Galian Industri, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Press, Depok, 2019.

### **Jurnal / Karya Ilmiah**

Aisyah Lailiyah, Penggunaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Mengingat dalam Undang-Undang (Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Geospasial; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), Jurnal *RechtsVinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017.

Albert Hamonangan Pardosi, Kekuatan berlakunya Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (S2), Fakultas Hukum Unpas, 2016.

Asto Yudho Kartiko & Rinaldi Rachmansyah, Disharmonisasi Hukum tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Peraturan Pemerintah terbaru yang Berkaitan dengan Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 4 No. 2, 2021.

Dananggana Satriatama, et. al., Upaya Sinkronisasi dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2, 2020.

Dedy Wijayanto dan Mohammad Achmadi, Potensi Pemanfaatan Ikan Air Tawar sebagai Lauk Alternatif bagi Masyarakat di Kota Bekasi, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Vol. 22 No. 1, 2017

Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm* (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), (S2), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1, 2012.

- Erwin Syahrudin dan Emilda Yofita, Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 06 No. 01, 2020.
- Eva Achjani Zulfa, Menelaah Arti Hak untuk sebagai Hak Asasi Manusia, *Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 1, 2005.
- Faturohman & Asnawi, Dimensi Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan dan Alam, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- I Nyoman Gede Sugiarta & Ida Ayu Putu Widiati, Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (S2), Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Indah Nur S. Saleh & Bitu G. S, Reformulasi Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, *Jatiswara*, Vol. 37 No. 2, 2022.
- Iskandar, Konsepsi dan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2011.
- Jauhari Ginting, Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, 2019.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, 2021.
- Muhamad Sadi Is, Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, Vol. 3 No. 3, 2020.
- Muhammad Syaiful Anwar & Rafiqah Sari, Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia, *Progresif: Jurnal Hukum XVI*, No. 1, 2021.

- Munif Bary Akbar, Kriminalisasi terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri yang dijadikan Tersangka dalam Perspektif Hukum Pidana, (S1), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020.
- Muskibah, et.al., Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Muslim Lobubun, et.al., Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara, *Al'Adl*, Vol. IX No. 1, 2017.
- Novita Ratna & Indah Cahyani, Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Nopyandri, Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2014.
- Mohammad Vieri Azuri, et.al., Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Konflik Pertambangan, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Reynaldo Sembiring, Menyoal Pengaturan Anti-Eco SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Ria Casmi Arrsa, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG), *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1, 2014.
- Rizal Irvan Amin & Achmad, Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Res Publica*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Rika Erawaty dan Siti Kotijah, Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (*Society Rights of a Fine and Healthy Environment*), *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 9 No. 1, 2013.
- Rochmani, Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi, *Masalah-Masalah Hukum* oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 44 No. 1, 2015.

- Salman Luthan, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, 2009.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Sudi Fahmi, Asas tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2, 2011.
- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel), (S2), Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sodikin, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo, Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Tenang Haryanto, et.al., Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 2, 2008.
- Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No.4, 2016.
- Wahyu Nugroho, et. al., Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4, 2018
- Zen Lutfulloh & Wahyu Donri, Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 47 No. 2, 2021.

### **Sumber Online**

- Abi Jam'an Kurnia, Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan diberikan Hak atas Tanah?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pemegang-izin-usaha-pertambangan-diberikan-hak-atas-tanah-lt5d2da8fd82f97>, diakses 1 Maret 2023.
- Arifin Rosid, Apa itu Hukum?, <https://arifinrosid.com/learning-law/>, diakses pada 10 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik, Pertambangan, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#:~:text=Pertambangan%20adalah%20suatu%20kegiatan%20pengambilan,dan%20di%20bawa%20perusahaan%20air>, diakses 23 Februari 2023.

- Berdikarionline, Makna “Dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945, <https://www.berdikarionline.com/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945/>, diakses 20 Maret 2023.
- Bukit Asam, Pengertian Batubara, <https://www.ptba.co.id/berita/artikel/getting-to-know-coal-563>, diakses 23 Februari 2023.
- DPN SBMI, Belajar Tentang Hak Konstitusional, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-konstitusional/>, diakses 20 Oktober 2022.
- Heylaw Edu, Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba, <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>, diakses 27 Oktober 2022.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Adanya%20perlindungan%20dari%20pemerintah%20terhadap,hukuman%20bagi%20pihak%20yang%20melanggarnya>, diakses pada 29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Batubara, <https://kbbi.web.id/batu%20bara>, diakses 23 Februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Inkonsistensi, <https://kbbi.web.id/inkonsistensi>, diakses 5 Juni 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsisten, <https://kbbi.web.id/konsisten>, diakses 11 Oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mineral, <https://kbbi.web.id/mineral>, diakses 23 Februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan, <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses 29 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertambangan, <https://kbbi.web.id/tambang>, diakses 23 Februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Taat Asas, <https://kbbi.web.id/taat%20asas>, diakses 5 Juni 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tambang, <https://kbbi.web.id/tambang>, diakses 23 Februari 2023.

- Kemenkumham Sumatera Utara, Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses 29 Mei 2023.
- Kongres Advokat Indonesia, Konsistensi Bernegara Hukum, <https://www.kai.or.id/berita/11322/konsistensi-bernegara-hukum.html>, diakses 8 Oktober 2022.
- KonsultanTambang.id, Tahapan-Tahapan Kegiatan Pertambangan, Apa Saja?, <http://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>, diakses 12 Oktober 2022.
- Kompasiana.com, Pejuang Lingkungan, <https://www.kompasiana.com/normalafitris/551f7cdba33311aa33b6697d/pejuang-lingkungan>, diakses 20 Oktober 2022.
- Muchlisin Riadi, Pengertian, Jenis, Asas, dan Tahapan Pertambangan, <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>, diakses 24 Februari 2023.
- Mulyadi, Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, <https://www.unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia>, diakses 22 Maret 2023.
- MOLegal, Izin Usaha Jasa Pertambangan, <https://molegal.biz/izin-usaha-jasa-pertambangan-iujp/>, diakses pada 25 Maret 2023.
- PUSHEP, Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Minerba, <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-perundang-undangan-pertambangan-minerba/>, diakses 1 Maret 2023.
- Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, diakses pada 29 Mei 2023.
- Universitas Islam Indonesia, Menilai UU Minerba untuk Kemakmuran Rakyat, <https://www.uii.ac.id/menilai-uu-minerba-untuk-kemakmuran-rakyat/>, diakses pada 14 Maret 2023.
- Walhi, Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, diakses 1 Oktober 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang R.I., No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 165

Undang Undang R.I., No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, L.N.R.I Tahun 2007 No. 106.

Undang Undang R.I., No. 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N.R.I Tahun 2009 No. 4.

Undang Undang R.I., No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, L.N.R.I Tahun 2009 No. 140.

Undang Undang R.I., No. 3 Tahun 2020, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N.R.I Tahun 2020 No. 147.

Undang Undang R.I., No. 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, L.N.R.I Tahun 2023 No. 6856.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 22 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, L.N.R.I Tahun 2021 No. 32.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 96 Tahun 2021, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N.R.I. Tahun 2021 No. 208.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., No. 7 Tahun 2020, Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, B.N.R.I Tahun 2020 No. 220.

Keputusan Mahkamah Agung R.I., No. 36/KMA/SK/2013, Pemberlakuan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tanggal 22 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I., No. 10/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I., No. 85/PUU-XI/2013, Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I., No. 37/PUU-XIX/2021, Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 September 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I., No. 25/PUU-VIII/2010, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Juni 2012.

Putusan Pengadilan Nomor 802/Pid.Sus/2020/PNByw, tanggal 27 Mei 2021.